



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Jakarta Selatan 12550 Tlp: 021-7231948
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Kota Bekasi Telp: 021-88955882
Website: www.fh.ubharajaya.ac.id Email: fh@ubharajaya.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ **III** /X/2024/FH-UBJ

Tentang

PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM SEMESTER GANJIL T.A. 2024/2025

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa dalam menyusun Tugas Akhir / Skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kep Rektor UBJ No. 041 Tahun 2022 Tentang Buku Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun Akademik 2024/2025.
7. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Semester Ganjil T.A. 2024 / 2025.

MENUGASKAN :

- Kepada : 1. **Sri Wahyuni, S.H., M.H**
2. **Ahmad Baihaki, S.Hi., M.H**
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum :
Tersebut No. 1 melaksanakan tugas sebagai Pembimbing 1/Materi
Tersebut No. 2 melaksanakan tugas sebagai Pembimbing 2/Teknis
2. Bimbingan dilaksanakan terhadap mahasiswa:
Nama : DINDA DWI NASHTITI
NPM : 202110115148
Judul Skripsi : PENENTUAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM PERDATA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK
3. Kegiatan bimbingan dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini, dan agar mahasiswa menghubungi dan berkonsultasi dengan pembimbing.
4. Pelaksanaan penulisan proposal skripsi dan penelitian dimulai sejak ditandatangani Surat Tugas ini.
5. Melaksanakan bimbingan proposal 3 (tiga) kali dan bimbingan skripsi minimal 8 (delapan) kali sampai selesainya penyusunan skripsi.
6. Surat Tugas ini berlaku selama maksimal 2 semester dan berakhir pada akhir semester Genap 2024/ 2025.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : **24** Oktober 2024
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. R Lina Sinaulan, S.E., SH., M.M., M.H
NIP. 2401637

**PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HUKUM
TERHADAP PUTUSAN KASASI MENGENAI
PENETAPAN HAK ASUH ANAK**

SKRIPSI

Oleh:

DINDA DWI NASHTITI

NPM: 202110115148



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2025**

**PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HUKUM
TERHADAP PUTUSAN KASASI MENGENAI
PENETAPAN HAK ASUH ANAK**

SKRIPSI

Oleh:

DINDA DWI NASHTITI

NPM: 202110115148



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2025**

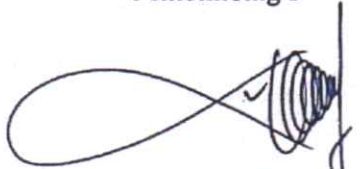
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perbandingan Pertimbangan Hukum Terhadap
Putusan Kasasi Mengenai Penetapan Hak Asuh
Anak
Nama Mahasiswa : Dinda Dwi Nashtiti
Nomor Pokok : 202110115148
Mahasiswa
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Jakarta, 30 Juli 2025

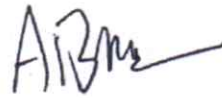
MENYETUJUI,

Pembimbing I



Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIDN. 0322078304

Pembimbing II



Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.
NIDN. 0324017702

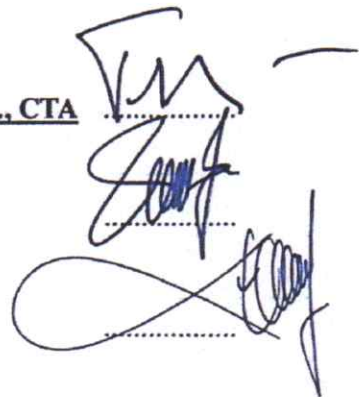
LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perbandingan Pertimbangan Hukum Terhadap
Putusan Kasasi Mengenai Penetapan Hak
Asuh Anak
Nama Mahasiswa : Dinda Dwi Nashtiti
Nomor Pokok Mahasiswa : 202110115148
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juli 2025

Jakarta, 30 Juli 2025

MENGESAHKAN,

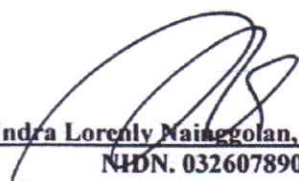
Ketua Penguji : Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si., CTA
NIDN. 9990295046
Penguji I : Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003
Penguji II : Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIDN. 0322078304



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H.
NIDN. 0326078902



Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum
NIDN. 8976950022

ABSTRAK

Dinda Dwi Nashtiti. 202110115148. Perbandingan Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Kasasi Mengenai Penetapan Hak Asuh Anak.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, namun tidak jarang berakhir dengan perceraian akibat perselisihan yang tidak terselesaikan. Perceraian ini menimbulkan akibat hukum, khususnya terkait hak asuh anak yang seringkali menjadi objek sengketa antara mantan suami istri. Padahal, secara normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, hingga Undang-Undang Dasar 1945, kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab yang sama dalam merawat, mendidik, dan memenuhi hak-hak anak demi kepentingan terbaik anak. Kegagalan orang tua dan pengadilan dalam mengutamakan kesejahteraan anak pasca perceraian berisiko mengabaikan hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penting untuk menelaah pertimbangan hukum dalam putusan hakim terkait hak asuh anak, khususnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2948 K/Pdt/2019 dan Nomor 3296 K/Pdt/2017, yang menurut penulis menunjukkan adanya kekeliruan dalam memperhatikan prinsip kepentingan terbaik anak.

Penelitian ini menjadi penting untuk menggali bagaimana perbedaan pertimbangan hukum antara dua wilayah, yakni Bandung dan Mojokerto, serta untuk mengevaluasi pelaksanaan kewajiban orang tua dalam perspektif hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi implementasi tanggung jawab ayah selaku orang tua dalam pemenuhan kebutuhan hidup anak di bawah umur, khususnya dalam konteks putusan perceraian di wilayah Bandung dan Mojokerto; serta menganalisis perbandingan pertimbangan hukum pada putusan kasasi terkait penetapan hak asuh anak di wilayah Bandung dan Mojokerto.

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2948 K/Pdt/2019 dan Nomor 3296 K/Pdt/2017 terkait penetapan hak asuh dan tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian. Hasil analisis menunjukkan bahwa Mahkamah Agung secara konsisten menegaskan kewajiban ayah dalam memenuhi nafkah anak sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik anak dan keadilan distributif. Perbedaan terlihat dalam penetapan hak asuh, di mana dalam perkara Bandung lebih menitikberatkan pada kondisi faktual dan kedekatan emosional anak dengan ayah, sedangkan dalam perkara Mojokerto Mahkamah Agung memilih memulihkan hak asuh kepada ibu berdasarkan pertimbangan normatif dan prosedural. Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa asas kepentingan terbaik anak tetap menjadi pijakan utama, meskipun implementasinya disesuaikan dengan fakta dan konteks masing-masing kasus.

Kata Kunci: Perceraian, Hak Asuh Anak, Nafkah Anak

ABSTRACT

Dinda Dwi Nashtiti. 202110115148. *Comparison of Legal Considerations in Cassation Decisions Regarding Child Custody Determinations.*

Marriage is a spiritual and physical bond between a man and a woman to form a happy and lasting family, but it often ends in divorce due to unresolved disputes. Divorce has legal consequences, particularly regarding child custody, which is often the subject of dispute between former spouses. However, according to various laws and regulations, such as Law No. 1 of 1974 on Marriage, the Child Protection Law, and the 1945 Constitution, both parents still have equal responsibility to care for, educate, and fulfill the rights of their children in the best interests of the children. The failure of parents and the court to prioritize the child's well-being after divorce risks neglecting the child's right to grow, develop, and receive comprehensive protection. Therefore, it is important to examine the legal considerations in court decisions regarding child custody, particularly in Supreme Court Decisions No. 2948 K/Pdt/2019 and No. 3296 K/Pdt/2017, which, according to the author, demonstrate errors in considering the principle of the child's best interests.

This research is important to explore the differences in legal considerations between two regions, namely Bandung and Mojokerto, and to evaluate the implementation of parental obligations from a civil law perspective. This study aims to identify and evaluate the implementation of the father's responsibilities as a parent in fulfilling the needs of minor children, particularly in the context of divorce decisions in the Bandung and Mojokerto regions; and to analyze the comparison of legal considerations in cassation decisions related to the determination of child custody in the Bandung and Mojokerto regions.

This study analyzes the legal considerations in Supreme Court Decisions No. 2948 K/Pdt/2019 and No. 3296 K/Pdt/2017 regarding the determination of custody and child support obligations after divorce. The analysis results show that the Supreme Court consistently emphasizes the father's obligation to fulfill child support in accordance with Article 41 of Law No. 1 of 1974, both implicitly and explicitly, by considering the principle of the best interests of the child and distributive justice. Differences are evident in the determination of custody, where in the Bandung case, the focus was on factual conditions and the child's emotional closeness to the father, while in the Mojokerto case, the Supreme Court chose to restore custody to the mother based on normative and procedural considerations. Both decisions demonstrate that the principle of the best interests of the child remains the primary foundation, although its implementation is adapted to the facts and context of each case.

Keywords: *Divorce, Child Custody, Child Support*